

ANALISIS KEBIJAKAN WATER ACT PERDANA MENTERI KEVIN RUDD TERHADAP SISTEM PEMERINTAHAN AUSTRALIA

Citra Aftika Kinanti, Anna Yulia Hartati

Universitas Wahid Hasyim

annayulia@unwahas.ac.id

Abstract

The "Water Act" policy during the government of Prime Minister Kevin Rudd has several possibilities as a way to deal with environmental conditions in Australia. During Kevin Rudd's time, with a Labor Party background which had a tendency towards environmental interests, it produced several responses and steps regarding environmental issues. The research method uses qualitative, with secondary data sources. Other sources such as the Agreement on Murray-Darling Basin Reform and the Water Act 2007 itself provide information about the structure and processes of water management in the Murray-Darling Basin region. Analysis of this document helps understand how the Water Act policy was implemented and explains the findings of this research as follows: this policy had a major impact on the Australian government system. This policy not only regulates air use effectively but also raises awareness of the importance of environmental monitoring and cooperation between governments and public authorities.

Keywords: Environment issues, Water Act, Kevin Rudd

Abstrak

Kebijakan "Water Act" pada masa pemerintahan Perdana Menteri Kevin Rudd memiliki beberapa kemungkinan sebagai salah satu cara penanganan kondisi dari lingkungan di Australia. Pada masa Kevin Rudd dengan latar belakang partai buruh yang memiliki kecenderungan atas kepentingan lingkungan yang cukup menghasilkan beberapa respon dan langkah mengenai isu lingkungan. Metode penelitian menggunakan kualitatif, dengan sumber data sekunder. Sumber lain seperti Agreement on Murray-Darling Basin Reform dan Water Act 2007 sendiri memberikan informasi tentang struktur dan proses pengelolaan air di wilayah Murray-Darling Basin. Analisis dokumen ini membantu memahami bagaimana kebijakan Water Act diimplementasikan dan diawasi. Temuan penelitian ini sebagai berikut: kebijakan ini sangat berdampak besar terhadap sistem pemerintahan Australia. Kebijakan ini tidak hanya mengatur penggunaan air secara efektif tetapi juga meningkatkan kesadaran akan pentingnya pengawasan lingkungan dan kerja sama antar pemerintah dan otoritas publik.

Kata kunci: Isu Lingkungan, Water Act, Kevin Rudd

A. PENDAHULUAN

Dalam dinamika pemerintahan di Australia, memiliki kaitan erat dengan perkembangan isu lingkungan yang menjadi salah satu fokus dari beberapa pihak. Adanya eksploitasi sumber daya alam yang makin banyak terjadi memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap beberapa aspek penting secara global. Dampak bagi sebagian besar masyarakat dunia salah satunya dikenal dengan pemanasan global. Pemanasan global sendiri menjadi ancaman besar bagi dunia dalam jangka waktu panjang. Dimana, pemanasan global menjadi suatu indikasi dari drai keadaan bumi kian waktu semakin kmengkhawatirkan. Hal tersebut tidak lepas dari

sebagian perhatian dunia khususnya bagi suatu pemerintahan untuk mempertimbangkan regulasi yang berlaku setiap negaranya, sehingga penerapan dari regulasi tersebut tidak mengganggu dari pada kondisi lingkungan global. Adapun di Australia di kenal salah stau partai yang juga memiliki fokus terhadap konsdisi lingkungan, bagi Partai buruh yang secara jelas mendorong adanya ketertarikan mengenai beberapa upaya yang dapat dilakukan terhadap isu kelingkungan melalui regulasi. Isu lingkungan menjadi daya tarik hampir sebagian dari keseluruhan lapisan masyarakat di Australia. Hal ini, di latar belakanginya adanya kesadaran kebutuhan dari kehidupan masyarakat Australia. Isu lingkungan sendiri aktif di ratifikasi secara global oleh beberapa negara, salah satunya seperti Jepang.

Isu lingkungan menjadi salah satu pertimbangan dari suatu pemerintahan sebagai latar belakang adanya proses pembuatan kebijakan yang dapat dijadikan sebagai regulasi publik. Dimana Australia menjadi salah satu negara yang ikut terdampak dari perubahan iklim global. Australia dengan luas wilayah sekitar 7.7772.535 KM² mengalami adanya krisis dalam pemenuhan kebutuhan sumber air. Dilihat dari iklim, rata – rata wilayah Australia di dominasi kering, namun pada wilayah bagian timur dan selatan beriklim sedang serta bagian utara beriklim tropis. Australia memiliki curah hujan pada wilayah tinggi bagian timur yang cukup tinggi sekitar (2000mm/tahun) dan pada wilayah gurun mengalami curah hujan yang rendah 250mm/tahun). Hal ini, menjadi dalah satu penyebab perubahan dari adanya potensi terjadinya bencana banjir yang ekstrem dan kekeringan maupun kelangkaan. Kondisi tersebut menjadikan adanya beberapa pertimbangan yang menjadi salah satu bentuk dukungan terhadap pemerintah untuk melibatkan isu lingkungan sebagai salah satu fokus utama. Dimana, isu lingkungan secara tidak langsung akan turut memberikan pengaruh bagi beberapa aspek seperti ekonomi maupun sosial dan politik di dalah kehiduoan masyarakat Australia.

B. METODE

Dalam penelitian mengenai Analisis kebijakan *Water Act* pada masa Perdana menteri Kevin Rudd terhadap sistem pemerintah Australia, peneliti menggunakan pendekatan metode penelitian kualitatif. Adapun pengumpulan data dalam penelitian ini, melalui karya tulis ilmiah maupun penjelasan data. Sehingga, pengumpulan data yang ada menghasilkan penelitian deskriptif. Pada kegiatan penelitian ini mencakup beberapa hal yang terdiri dari pengumpulan data, analisis data dan akan di rumuskanya suatu kesimpulan yang merujuk pada tujuan analisis data tersebut.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sumber data sekunder yang digunakan sebagai pelengkap dalam bahan penelitian. Adapun data sekunder merupakan keadaan dimana pemenuhan data yang ada didapat bukan dari sumber pertama, melainkan adanya peran sumber data penelitian melalui media perantara. Dalam proses pemenuhan data penelitian, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui aertikel ilmiah, jurnal ilmiah dan berita pada media daring, yang memiliki kesamaan pada latar belakang masalah ini terkait kebijakan *Water Act* di Australia Dengan melihat dari struktur pengumpulan data diatas yang di telah dianggap cukup untuk pemenuhan data penelitian, maka akan dilakukanya suatu penyaringan data dimana nantinya akan diteruskan dalam tahap proses pengembangan data mengenai masalah utama tersebut.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem demokrasi di Australia memeiliki pengaruh dalam keberlaksanaan dari regulasi yang akan maupun yang sudah dijalankan. Australia sebagai negara dengan pemerintahan yang federal, membagi jenjang pemerintahan dalam negeri menjadi kedalam tiga bagian, yaitu terdiri dari Pemerintah federal, Negara bagian serta Pemerintah lokal. Dimana setiap dari bagian pemerintah tersebut memiliki kewenangan yurisdiksi yang berbeda, akan tetapi dalam hal kelangkaan sumber daya air ini menjadi salah satu fokus bersama bagi setia lapisan pemerintah dari lokal hingga pusat. Peran dari sistem demokrasi sendiri secara mendasar perlu mempertimbangkan kebutuhan dari pada masyarakat. hal tersebut akan sangat mempengaruhi perspektif masyarakat terhadap regulasi maupun kinerja suatu pemerintahan kedepan.

Fenomena kebijakan *Water Act* di Australia melibatkan beberapa perspektif dalam implementasinya. Dimana, kebijakan *Water Act* sendiri dilatar belakangi adanya indikasi kondisi lingkungan secara global yang cukup mengkhawatirkan bagi beberapa negara, khususnya di Australia. Kesadaran atas lingkungan terhadap beberapa lapisan masyarakat Australia yang sadar akan ancaman lingkungan kedepan turut bersikap dengan mendukung adanya regulasi yang tegas untuk penanganan pada aspek lingkungan. Adanya krisis sumber daya berupa air. Masalah yang cukup bekepanjangan mengenai air telah lama menjadi diskusi di kalangan pemerintah Australia. Dimana, pada tahun 1994 dilakukan epenyegaran keputusan melalui adanya forum konsolidasi antar aparat pemerintah untuk penanganan dari permasalahan tersebut yang masih dianggap belum ada bukti kongret dari pertumbuhan kesepakatan yang dibentuk.

Salah satu bentuk langkah yang dilakukan pada masa Kevin Rudd, dengan memberlakukan kebijakan *Water Act* sebagai bentuk cara untuk dapat menanggulangi.¹Regulasi yang dilakukan oleh pemerintah sebagai penanggulangan lingkungan. Dengan pengelolaan air yang baik, dan aturan yang diperketat atas penggunaan sumber daya alam akan memudahkan bagi masyarakat untuk bisa beraktivitas. *Water Act* sendiri memunculkan berbagai macam pandangan dari beberapa pihak. Ada dari sebagian pihak pemerintah Australia merasa *Water Act* akan menyulitkan pertumbuhan ekonomi di Australia, dimana adanya pandangan. Pengetatan melalui regulasi yang ada dinilai memberatkan beberapa pihak di sektor ekonomi yang mengharuskan mereka untuk mengurangi dampak dari penjaan sumber daya alam di Australia.² Sehingga munculnya *Water Act* sendiri di Australia dianggap cukup membantu dalam mengatasi kekhawatiran terhadap resiko resiko yang di timbulkan dari aktivitas masyarakat sehari hari.

1. Pengaturan dan Pengawasan Air

Water Act 2007 mengatur penggunaan air di wilayah Murray-Darling Basin, yang merupakan salah satu sumber air penting di Australia. Kebijakan ini memastikan bahwa setiap proposal yang dapat mempengaruhi aliran, penggunaan, pengendalian, atau kualitas air di wilayah tersebut harus dilaporkan dan dipertimbangkan oleh pemerintah dan otoritas publik. Pengaturan dan pengawasan air di Australia melalui *Water Act 2007* merupakan kebijakan yang signifikan dalam mengelola sumber daya air di wilayah Murray-Darling Basin.

Berikut adalah beberapa aspek penting dari pengaturan dan pengawasan air melalui *Water Act 2007*. *Water Act 2007* bertujuan untuk mengembalikan tingkat ekologis sumber daya air di wilayah Murray-Darling Basin ke kondisi yang lebih berkelanjutan. *Water Act 2007* membentuk MDBA Murray-Darling Basin Authority (MDBA) sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam mengelola sumber daya air di wilayah Murray-Darling Basin. *Water Act 2007* memerintahkan MDBA untuk menyusun dan mengembangkan Basin Plan, yang merupakan rencana yang komprehensif untuk mengelola sumber daya air di wilayah tersebut. Kebijakan ini juga menekankan pentingnya menggunakan air secara berkelanjutan untuk mencapai hasil ekonomi, sosial, dan lingkungan yang optimal.

¹ Skinner, D., & Langford, J. (2013). Menetapkan undang-undang untuk pengelolaan DAS yang berkelanjutan: kisah Undang-Undang Air Australia (2007). *Kebijakan Air*, 15 (6), 871-894.

² Yusuf Hakim Gumilang; Chusnul Mar`iyah, pembimbing; Ikrar Nusa Bhakti, penguji; Cecep Hidayat, penguj (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2011)

Water Act 2007 memberikan peran kepada Bureau of Meteorology untuk mengumpulkan dan menyampaikan informasi yang komprehensif tentang sumber daya air di Australia. Kebijakan ini juga melibatkan pengawasan kualitas air dan pengelolaan air yang berkelanjutan untuk menjaga nilai ekologis wilayah tersebut. Water Act 2007 mempromosikan kerja sama antara pemerintah federal, negara bagian, dan otoritas lokal dalam mengelola sumber daya air.

Kebijakan ini juga melibatkan Australian Competition and Consumer Commission untuk mengembangkan dan menerapkan aturan-aturan pasar air dan biaya air. Water Act 2007 memerintahkan peninjauan sosio-ekonomi Basin Plan setiap lima tahun untuk mengevaluasi dampaknya dan membuat perubahan yang diperlukan. Kebijakan ini juga melibatkan peninjauan aktivitas pengelolaan air secara berkala untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut mencapai tujuan yang ditetapkan

2. Pengawasan Lingkungan

Kebijakan ini juga menekankan pentingnya melakukan penilaian dampak lingkungan dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh otoritas pemerintah. Hal ini bertujuan untuk melindungi sumber daya alam dan lingkungan hidup di wilayah Murray-Darling Basin. Undang-Undang *Perlindungan Ozon dan Pengelolaan Gas Rumah Kaca Sintetis 1989* (Undang-Undang) dibentuk untuk memenuhi kewajiban Australia berdasarkan Konvensi Wina dan Protokol Montreal dan kemudian mencakup kewajiban Australia berdasarkan Protokol Kyoto. Protokol ini bertujuan untuk menyatukan negara-negara di seluruh dunia dengan tujuan bersama untuk mengurangi penggunaan Zat Perusak Ozon (ODS), yang merusak lapisan ozon pelindung dunia, dan gas rumah kaca sintetis (SGG) yang memiliki Potensi Pemanasan Global (GWP) yang tinggi. Sejumlah zat ini memiliki aplikasi yang sah dalam masyarakat modern kita sebagai zat pendingin dan umumnya ditemukan dalam berbagai aplikasi di seluruh industri otomotif, pendinginan, dan pendingin udara. Pemerintah Australia menyadari perlunya memberikan akses ke zat-zat ini dengan cara yang diatur dan menerapkan skema perizinan dan otorisasi untuk mencapainya. Peraturan *Perlindungan Ozon dan Pengelolaan Gas Rumah Kaca Sintetis 1995* (Peraturan) memuat ketentuan untuk memberi wewenang kepada orang yang telah membuktikan diri kompeten dan memenuhi syarat untuk memperoleh lisensi yang memungkinkan mereka bekerja dengan refrigeran dan peralatan refrigerasi dan pendingin udara. Skema perizinan dikelola

oleh Australian Refrigeration Council (ARC) atas nama Department of Sustainability, Environment, Water, Population and Communities.

Lisensi yang dikeluarkan oleh ARC mencakup beberapa ketentuan yang diuraikan dalam Peraturan yang harus dipatuhi untuk mencapai tujuan yang lebih luas berdasarkan Protokol Montreal. Meskipun departemen mendorong orang-orang yang memiliki lisensi melalui ARC untuk bertindak sesuai dengan ketentuan lisensi mereka, ada beberapa kasus di mana hal ini tidak terjadi dan tindakan kepatuhan harus dilaksanakan. Demikian pula, individu atau bisnis yang terlibat dalam penanganan refrigeran atau peralatan pendingin dan pendingin udara dan tidak memiliki lisensi melalui ARC juga bertanggung jawab atas tindakan kepatuhan. Ini termasuk individu dan bisnis yang memperoleh, memiliki, atau membuang refrigeran tanpa otorisasi yang sesuai yang dikeluarkan melalui ARC, misalnya Otorisasi Perdagangan Refrigeran (RTA).

Sebagian besar perilaku yang tidak patuh dapat diperbaiki dengan mendidik para pemangku kepentingan tentang persyaratan mereka berdasarkan Peraturan. Dalam kasus di mana perilaku tidak patuh yang serius atau berulang terjadi, tindakan kepatuhan yang lebih ketat mungkin diperlukan. Individu atau bisnis yang memiliki izin melalui ARC menghadapi hukuman mulai dari peringatan resmi hingga penangguhan izin mereka. Penanganan dan pemasangan peralatan pendingin dan pendingin udara tanpa otorisasi yang benar merupakan pelanggaran tanggung jawab ketat berdasarkan Peraturan. Pelanggaran berdasarkan peraturan tersebut membawa hukuman maksimum sebesar \$1.100 untuk individu dan \$5.500 untuk badan hukum.

Audit Kepatuhan

ARC melakukan audit atas nama departemen untuk memastikan kepatuhan terhadap Peraturan. Jaringan auditor di seluruh Australia memastikan cakupan yang baik dari bisnis dan individu yang memiliki lisensi melalui ARC. Audit dapat dilakukan baik secara terencana maupun "langsung". Terlepas dari jenis audit yang dilakukan, Anda memiliki hak-hak berikut saat auditor ARC memasuki tempat Anda untuk tujuan melakukan audit: hak untuk menolak memberikan izin kepada auditor untuk masuk, atau tetap berada di tempat Anda, hak untuk menarik persetujuan Anda kapan saja, bahkan setelah Anda memberikan persetujuan lisan atau tertulis.

Departemen mengharapkan semua auditor ARC untuk bertindak secara profesional dan menjunjung tinggi hak-hak orang atau bisnis tempat audit berlangsung. Setiap keluhan terkait tindakan auditor ARC harus disampaikan kepada ARC secara tertulis terlebih dahulu.

Individu atau bisnis yang ditemukan tidak patuh selama audit diberikan pemberitahuan tertulis yang mencakup masalah yang diidentifikasi selama audit. Pemberitahuan tersebut juga akan menunjukkan jangka waktu di mana masalah tersebut harus diselesaikan agar menjadi patuh. Semua pelanggaran kecil terhadap ketentuan RTA ditindaklanjuti oleh ARC sebagai bagian dari proses pembaruan otorisasi. Perusahaan yang ditemukan tidak patuh dan tidak mematuhi dalam jangka waktu yang ditentukan pada pemberitahuan tertulis akan berisiko tidak memperbarui RTA mereka. Setiap pertanyaan atau masalah terkait proses ini harus disampaikan secara tertulis kepada ARC.

Pendekatan terhadap kepatuhan terhadap Undang-Undang tersebut diuraikan dalam Kebijakan Kepatuhan Departemen. Jika pengaturan diri dan pendidikan gagal mencapai hasil kepatuhan, departemen memberikan respons yang ditargetkan melalui langkah-langkah yang tercakup dalam peraturan. Setelah penilaian awal dilakukan oleh auditor ARC, ada sejumlah pelanggaran serius yang harus diperbaiki dalam waktu 14 hari, jika tidak, pelanggaran tersebut akan secara otomatis dirujuk ke departemen untuk ditindaklanjuti. Pelanggaran tersebut meliputi: Individu yang menangani refrigeran yang tidak memiliki lisensi dari ARC, Peserta pelatihan tanpa pengawasan menangani refrigerant, Bisnis yang tidak memiliki semua peralatan yang dipersyaratkan dalam lisensi mereka, atau peralatan tersebut tidak beroperasi dengan benar (detektor kebocoran, pompa vakum, unit pemulihan), Menggunakan silinder yang tidak termasuk dalam tanggal pengujian, Menggunakan tabung yang tidak dapat diisi ulang

Pelanggaran berat dan pelanggaran yang diidentifikasi dan dinilai oleh ARC yang tidak diperbaiki tepat waktu akan dirujuk ke departemen untuk manajemen kasus. Kasus-kasus di mana orang gagal memperbaiki praktik mereka yang tidak patuh dapat dinilai oleh Panel Manajemen Kepatuhan di mana keputusan dapat dibuat untuk menunjuk penyelidik pemerintah untuk menangani kasus tersebut. Penyelidik beroperasi sesuai dengan Kebijakan Kepatuhan dan Penegakan Departemen dan dapat mengajukan surat perintah, yang memberi mereka kewenangan tambahan dalam hal mengumpulkan dan menyita barang-barang sebagai bukti. Hal ini dapat mengakibatkan rujukan ke Departemen Penuntutan Umum Persemakmuran dan denda berikutnya yang tercakup dalam Tindakan Kepatuhan di atas. Perusahaan yang tidak memperbaiki insiden ketidakpatuhan mungkin tidak akan memperbarui lisensinya.

Water Act 2007 memastikan bahwa setiap tahun, pemerintah harus menentukan kebutuhan air manusia kritis di wilayah tersebut. Kebutuhan ini harus dipenuhi sebelum

akhir bulan Mei setiap tahun. Kebijakan ini juga menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah dan otoritas publik dalam mengelola sumber daya air. Perjanjian-perjanjian yang dibuat harus dipahami dan disepakati oleh semua pihak yang terkait. Australia menghadapi tantangan besar untuk memastikan pasokan air berkelanjutan untuk pertanian, lingkungan dan masyarakat dalam menghadapi variabilitas iklim, kelangkaan air dan meningkatnya permintaan air. Berbagai lembaga di berbagai tingkat pemerintahan memiliki peran dalam pengelolaan sumber daya air. Pemerintah negara bagian dan teritori bertanggung jawab utama untuk mengelola air dalam wilayah hukum mereka. Pemerintah Australia menyediakan koordinasi dan kepemimpinan nasional untuk mendorong reformasi kebijakan dan hukum guna mengelola sumber daya air secara berkelanjutan dan produktif bagi generasi mendatang warga Australia.

Untuk mendorong reformasi air, kami berkolaborasi dan berkonsultasi dengan pemerintah negara bagian dan teritori, badan Pemerintah Australia lainnya yang berkepentingan dalam pengelolaan air, ilmuwan, dewan dan komite pakar, serta masyarakat. Kami juga terlibat dalam diskusi multilateral tentang isu kebijakan air internasional, berbagi pengetahuan dan pengalaman kami tentang pengelolaan air berkelanjutan untuk semua pengguna air dan lingkungan. Kebijakan air kami meningkatkan pengelolaan sumber daya air Australia yang berkelanjutan, dan meningkatkan keamanan air bagi masyarakat, pertanian, dan lingkungan sehingga mereka memiliki persediaan air yang andal di masa depan.

Prakarsa Air Nasional dikembangkan pada tahun 2004 dan merupakan cetak biru Australia untuk reformasi air nasional. Prakarsa ini disetujui oleh Pemerintah Australia dan semua negara bagian dan teritori, yang telah membuat kemajuan signifikan dalam mengimplementasikan tindakan berdasarkan perjanjian tersebut. Pemerintah Australia berkomitmen untuk memperbarui Prakarsa Air Nasional guna mendorong reformasi air nasional yang berkelanjutan dan memastikan bahwa isu-isu air yang penting secara nasional memiliki prinsip dan kebijakan yang sesuai dengan tujuan untuk memandu pengelolaan.

Pemerintah Australia telah berkomitmen untuk membentuk Komisi Air Nasional baru guna mendorong reformasi air dan mempersiapkan sumber daya air Australia untuk masa depan. Departemen akan melakukan pekerjaan peninjauan awal untuk menentukan peran dan tanggung jawab komisi sebagai langkah pertama dalam pembentukannya. Komisi Air Nasional pertama didirikan pada tahun 2004, sebelum dihapuskan pada tahun 2014. Tanggung jawab komisi tersebut meliputi menilai kemajuan yurisdiksi terhadap tujuan

Inisiatif Air Nasional dan memberikan saran kepada pemerintah Australia tentang masalah air nasional.

Pemerintahan Rudd juga mengumumkan dana sebesar \$1,7 miliar untuk meningkatkan efisiensi penggunaan air dan mengurangi hambatan-hambatan dalam aliran air di wilayah Murray-Darling Basin. Dana ini digunakan untuk membangun infrastruktur yang lebih efisien dan mengurangi kehilangan air melalui evaporasi dan cara lainnya Di Cekungan Murray–Darling, tempat tinggal lebih dari 50 Suku Bangsa Pertama, air merupakan bagian penting dari hubungan dengan Negara. Akan tetapi, dampak penjajahan telah sangat memengaruhi akses masyarakat ini terhadap air. Kini, masyarakat Suku Bangsa Pertama memiliki kurang dari 0,2 persen hak atas air permukaan . Program Hak Air Aborigin Lembah Murray–Darling senilai \$100 juta (program) merupakan inisiatif penting untuk membantu mengatasi dampak ini.

Pemerintah Australia telah mengumumkan dimulainya fase pembelian program tersebut. Pemerintah telah merilis kerangka kerja pembelian strategis dan mengonfirmasi pengaturan tata kelola sementara. Hal ini mengikuti keputusan pemerintah untuk meningkatkan pendanaan program dari \$40 juta menjadi \$100 juta sebagai bagian dari upaya yang lebih luas untuk memperkuat Undang-Undang Amandemen Air (Memulihkan Sungai Kita) 2023 dan untuk memberikan pengakuan yang lebih besar terhadap nilai-nilai dan penggunaan air oleh Masyarakat Bangsa. Program ini mendukung berbagai aspek kesejahteraan masyarakat First Nations, termasuk: kultural, sosial, ekonomis, rohani, kebutuhan lingkungan.

D. KESIMPULAN

Sebagai negara dengan luas wilayah yang mencakup berbagai macam ekosistem alam, Australia menjadi salah satu negara yang ikut serta dalam menciptakan regulasi khusus mengenai lingkungan. Latar belakang kondisi permasalahan air yang dirasa mengkhawatirkan bagi beberapa lapisan penduduk, menjadikan munculnya pandangan mengenai regulasi yang perlu untuk mengatasi. Water Act menjadi salah satu langkah yang digalakan pada masa pemerintahan Kevin Rudd. Kevin Rudd dengan latar belakang partai buruh, yang cukup dikenal memiliki pandangan yang cenderung mengutamakan konsisi lingkungan. Adapun Water Act, dengan berjalanya waktu mulai menghasilkan beberapa perspektif di kalangan publik mauoun pemerintah, yang tetap mempertimbangkan keuntungan, hal ini secara khsus dilihat dari segi ekonomi Australia.

Dalam analisis kebijakan *Water Act 2007* masa pemerintahan Kevin Rudd, dapat disimpulkan bahwa kebijakan ini sangat berdampak besar terhadap sistem pemerintahan Australia. Kebijakan ini tidak hanya mengatur penggunaan air secara efektif tetapi juga meningkatkan kesadaran akan pentingnya pengawasan lingkungan dan kerja sama antar pemerintah dan otoritas publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Bennet, Jeff (Ed.). *The Evolution of Markets for Water: Theory and Practice in Australia*. UK: Edward Elgar Publishing Ltd., 2005.
- Blaug, Ricardo and John Schwarzmantel (Eds.). *Democracy: A Reader*. Edinburgh: Edinburgh University Press, 1988.
- Froschio, SM, Bolton, N., Cooke, R., Wittholz, M., & Cunliffe, D. (2016). Undang-Undang Air Minum Aman Australia Selatan: ringkasan tahun pertama penerapannya. *Jurnal Air dan Kesehatan* , 14 (3), 460-470.
- Pickwell, L. (2007). *Australia: mengenal ragam budaya dan geografi*. Tiga Serangkai.
- Skinner, D., & Langford, J. (2013). Menetapkan undang-undang untuk pengelolaan DAS yang berkelanjutan: kisah Undang-Undang Air Australia (2007). *Kebijakan Air* , 15 (6), 871-894.
- Yusuf Hakim Gumilang; Chusnul Mar`iyah, pembimbing; Ikrar Nusa Bhakti, penguji; Cecep Hidayat, penguji (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2011
- Joske, P. E. Australian Federal Government. Melbourne: Butterworth Pty Ltd., 1976.
- Mar`iyah, Chusnul (Ed.). *Indonesia-Australia: Tantangan dan Kesempatan dalam Hubungan Politik Bilateral*. Jakarta: Program Pascasarjana Fisip UI, 2005.
- Mule, Rosa. *Political Parties, Games and Redistribution*. UK: Cambridge University Press, 2004.
- Patricia Fitzpatrick, et, al., “Environmental Impact Assessment under the Mackenzie Valley Resource Management Act: Deliberative Democracy in Canada’s North”, (15 February 2008 / Published online: 27 March 2008_ *Springer Science+Business Media, LLC 2008*), diakses pada Rabu 8 Juni 2011 pukul 17.30. WIB
- Williams, Paul D. “The 2007 Australian Federal Election: The Story of Labor’s Return from the Electoral Wilderness”, sumber *Australian Journal of Politics and History*: Volume 54, Number 1, 2008, pp. 104-125.